



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Februari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)
UNIT KERJA : BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ADI HENDRIK MANAFE
2. Jabatan : KEPALA
3. NHK : 89856

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.460.000.000

1. Tanah Seluas 1615 m2 di KAB / KOTA KUPANG, HASIL SENDIRI
Rp. 200.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 556 m2/170 m2 di KAB / KOTA KOTA
KUPANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.010.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 500 m2/189 m2 di KAB / KOTA KOTA
KUPANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.250.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 140.000.000

1. MOBIL, TOYOTA RUSH MINIBUS Tahun 2011, HASIL SENDIRI
Rp. 140.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 233.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 128.858.872

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 2.961.858.872

III. HUTANG Rp. 196.212.476

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.765.646.396

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-



Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.